BAB II

SUNGAI NIL SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN KONFLIK

Sungai Nil dengan umurnya yang sudah sangat tua serta melewati beberapa teritori negara menyebabkan sungai ini memiliki sejarah yang panjang terkait dengan hak kepemilikan khusunya yaitu mengenai pembagian hak atas sumber daya yang ditawarkannya. Tentu saja masing-masing negara yang dilewati oleh Sungai Nil akan mempertahankan hak mereka masing-masing untuk menjamin manfaat yang mereka peroleh dari sungai tersebut.

2.1 Perjanjian antara negara-negara pariah

Pada era modern ini, terjadi peningkatan upaya yang diarahkan pada penanganan Sungai Nil serta konflik yang dapat timbul di sekitarnya. Peningkatan perhatian dalam upaya tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu peningkatan penduduk serta kondisi masyarakat sekitarnya (Lumumba, 2007). Peningkatan penduduk di negara-negara yang dilewati oleh Sungai Nil berarti adanya kenaikan kebutuhan atas sumber daya sehingga meningkat juga keinginan negara untuk mengamankan diri dari kelangkaan air. Faktor kedua yaitu kondisi masyarakat di negara-negara pariah tersebut masih dapat masuk ke dalam kategori negara berkembang dimana masyarakatnya menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, kelaparan, degradasi lingkungan, bencana alam, dan seterusnya (Lumumba, 2007).

Gambar 2.1 Peta Aliran Sungai Nil diantara Negara-Negara Pariah

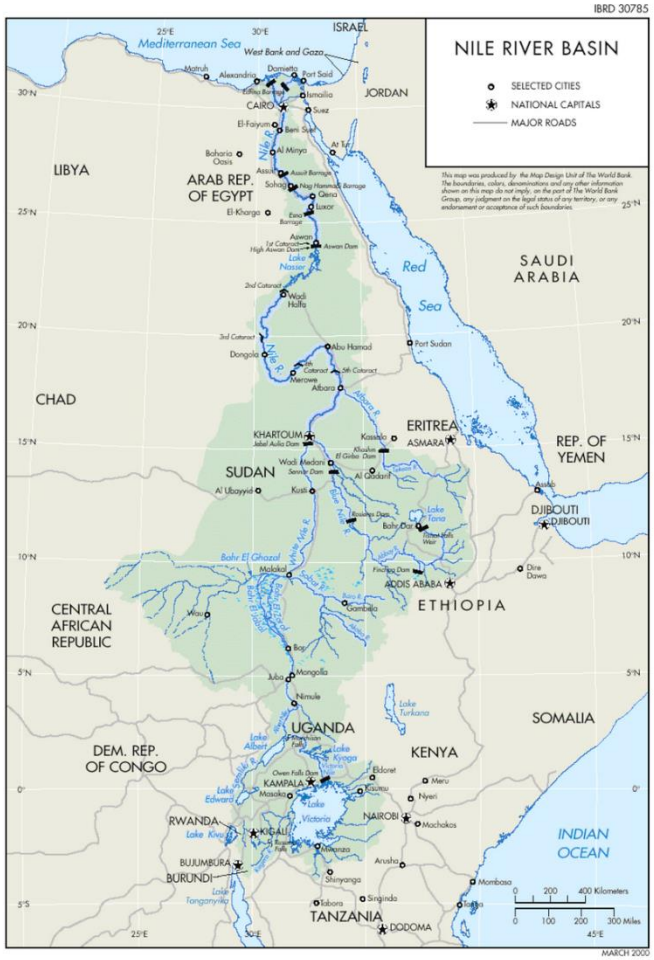

sumber : https://siteresources.worldbank.org, 2000

Oleh karena itu, para negara pariah sesuai pada gambar 2.1 yaitu negara yang dilalui oleh Sungai Nil yaitu Mesir, Burundi, Tanzania, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Sudan Selatan, telah melakukan perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral untuk mengatur pembagian hak atas Sungai Nil. Pada dasarnya, perjanjian masih bertujuan untuk mengatur perilaku negara-negara agar meminimalisir adanya bentrok namun kini bentuknya sudah lebih terorganisir. Kerangka regulasi formal pertama kali dikembangkan ketika kolonisasi Inggris mulai masuk ke Mesir pada tahun 1882-1954 (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

2.1.1 Perjanjian Bilateral

2.1.1.1 Nile Waters Agreement of 1929

Perjanjian ini dilakukan antara Mesir dengan Inggris untuk mengatur penggunaan Sungai Nil dengan Inggris yang bertindak sebagai perwakilan bagi koloninya di Sungai Nil (Kimenyi and Mbaku, 2015). Pada kuartil ketiga abad ke 19, nilai penting dari Sungai Nil bagi Barat meningkat dikarenakan tiga peristiwa yaitu penemuan sumber Sungai Nil di Danau Victoria pada 1862, pembukaan Terusan Suez pada 1869, dan jatuhnya ekonomi Mesir pada 1876 (Collins, 1990). Pada awalnya, intervensi Inggris di Mesir disebabkan oleh kepentingan mereka dengan Timur Jauh (negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara) tetapi kemudian Inggris memiliki ketertarikan dengan sektor agrikultur Mesir sehingga mendorong kebijakan luar negeri mereka di Mesir (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

Inggris mengamankan kepentingan mereka di Mesir yaitu terkait impor kapas ke Manchester dengan cara mengamankan sumber air Mesir, cara yang dilakukan oleh mereka yaitu segera menyusun kerangka institusional formal yang dapat meregulasi Sungai Nil untuk menggantikan kerangka informal sebelumnya (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Pakta ini dikembangkan oleh Inggris dengan 3 pihak yang berbeda; pakta pertama yaitu dengan Italia pada 1891 yang memperbolehkan Italia untuk mengkolonisasi Eritrea sebagai ganti jaminan atas keamanan sumber air bagi Mesir; pakta kedua dengan Ethiopia pada 1902 yang membatasi tindakan Ethiopia di Nil Biru tanpa izin Inggris dan Sudan; pakta

terakhir yaitu ditandatangani oleh Mesir yang memberikan Mesir hak untuk menjaga aliran Sungai Nil Putih dan mem-veto seluruh bentuk proyek yang dapat mengganggu aliran sungai tersebut (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

Ketiga pakta yang telah ditandatangani ini mengatur hak negara-negara riparian berdasarkan pada *Prior Appropriation Doctrine* yang berasal dari hukum air di wilayah barat Amerika Serikat (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Doktrin ini menyatakan bahwa hak atas air ditentukan oleh prioritas penggunaan artinya siapa yang pertama menggunakan air tersebut untuk suatu kepentingan maka dapat mendapatkan hak atas air tersebut (Cornell Law School, n.d.). Berdasarkan pada doktrin ini, Inggris dan Mesir berhasil mengamankan hak Mesir atas Sungai Nil yang awalnya hanya didasarkan pada sejarah serta memberikan hak juga baik Sudan terhadap penggunaan air Sungai Nil dan menjamin hak untuk Uganda mengembangkan proyek hydropower mereka (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

Mulai terbentuknya kerangka formal bagi negara-negara riparian ini turut mendorong kerjasama diantara mereka untuk membuat proyek penyimpanan air di negara-negara hulu yang dapat bermanfaat bagi mereka dalam proyek *hydropower* dan di saat yang bersamaan juga meningkatkan volume air yang dapat digunakan oleh negara-negara di hilir (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

2.1.1.2 The 1959 Nile Waters Agreement

Pada tahun 1952, Mesir berkeinginan untuk membangun bendungan namun sebelum hal tersebut dilakukan Mesir perlu membuat sebuah perjanjian terlebih dahulu dengan pemerintah Sudan untuk mengatur alokasi air Sungai Nil serta kompensasi bagi masyarakat di Wadi Halfa yang akan menjadi lokasi *reservoir* dari bendungan (Abdalla, 1971). Sebelum perjanjian ini dihasilkan, sistem irigasi di Sudan mengikuti Nile Waters Agreement 1929 dengan Inggris yang mewakili Sudan. Perjanjian ini sendiri dibuat dengan tujuan mengamankan jatah air bagi Mesir sehingga perjanjian ini membatasi ekspansi agrikultur bagi Sudan (Abdalla, 1971). Perjanjian ini membatasi jumlah air yang dapat disimpan oleh Sudan di Bendungan Sennar di musim kering dan apabila mengambil lebih dari perjanjian maka dianggap merugikan Mesir kemudian Sudan juga dibatasi dalam membuang air di Kanal Utama Gezira ketika musim banjir (Abdalla, 1971). Kedua negara sepakat untuk memperbaiki keadaan dengan meningkatkan *reservoir* di Bendungan Sennar tetapi solusi tersebut tidak bertahan lama dan Sudan kembali menghadapi kekurangan air (Abdalla, 1971).

Mesir dan Sudan akhirnya mengadakan pembicaraan yang diadakan di Kairo dan Khartoum pada tahun 1954 sampai 1958. Dalam pembicaraan ini, delegasi Sudan menyatakan bahwa mereka akan mem-veto proyek High Dam milik Mesir apabila kepentingan mereka tidak dijaga melalui beberapa ketentuan (Abdalla, 1971). Tetapi delegasi Mesir merasa bahwa proposal yang diajukan oleh Sudan dapat merusak hak bagian mereka dan delegasi Mesir terus berusaha memberikan angka pasti terkait pembagian air yang seluruhnya ditolak oleh Sudan

(Abdalla, 1971). Negosiasi berjalan dengan sangat alot karena kedua belah pihak yang tetap berpegang pada kepentingan masing-masing tanpa kompromi.

Pada 2 Juli 1958, Sudan meninggikan batasan di *reservoir* Bendungan Sennar untuk menyimpan lebih banyak air tanpa pemberitahuan kepada Mesir (Abdalla, 1971). Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Sudan sudah tidak lagi mendukung Nile Waters Agreement 1929 dengan tidak mematuhi ketentuan yang diatur di dalamnya, Pemerintah Sudan menyatakan bahwa Sudan tidak melihat perjanjian tersebut binding karena perjanjian diadakan dengan Inggris tanpa pertimbangan dari Sudan dan ketika Sudan merdeka, pemerintah belum meratifikasi perjanjian tersebut (Abdalla, 1971).

Walaupun alasan-alasan yang diberikan oleh Sudan jika didasarkan pada hukum internasional sebenarnya tidak dapat diterima, Sudah tetap pada pendirian mereka untuk menolak Nile Waters Agreement 1929 sehingga pada September 1958, hubungan kedua negara semakin rusak (Abdalla, 1971). Pada bulan Oktober 1958, Perdana Menteri Sudan dinyatakan akan pergi ke Mesir untuk menyelesaikan sengketa ini, Sudan harus segera menyelesaikan permasalahan ini karena kondisi politik domestik saat itu yang mulai tidak kondusif dan keadaan ekonomi yang kurang baik karena gagal panen kapas (Abdalla, 1971).

Pada November 1959, Nile Waters Agreement yang baru berhasil disetujui antara Mesir dengan Sudah setelah kepemimpinan Perdana Menteri saat itu, Abdullah Khalil, diserahkan pada Ibrahim Abbud sebagai Panglima tertinggi Sudan beserta 6 petinggi lainnya (Abdalla, 1971). Namun sayangnya, hasil dari perjanjian

ini tidak jauh berbeda dengan perjanjian sebelumnya pada tahun 1929 serta mendapat respon negatif dari masyarakat Sudan karena hasil dari perjanjian yang masih tidak menguntungkan masyarakat Sudan (Abdalla, 1971).

2.1.2 Perjanjian Multilateral

2.1.2.1 1999 Nile Basin Initiative

Nile Basin Initiative (NBI) diawali oleh kesepakatan yang berhasil diraih pada Maret 1998 di Tanzania terkait pembagian serta pengaturan Sungai Nil (Swain, 2002). NBI secara resmi diluncurkan pada Februari 1999 diantara negara-negara riparian yaitu Mesir, Sudan, Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Republik Kongo, dan Eritrea (International Waters Governance, n.d.). NBI berisikan *Council of Ministers of Water Affairs of the Nile Basin* (Nile-COM), *Technical Advisory Committee* (Nile-TAC) dan Sekretariat (Nile-SEC) yang memiliki visi untuk mencapai perkembangan sosio-ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Sungai Nil secara adil (Swain, 2002). Untuk mencapai visi tersebut, NBI memiliki tujuh proyek.

NBI sendiri memiliki dua jalur kerjasama yaitu proyek teknis NBI dan Cooperative Framework Agreement (CFA) (Seide, 2014). Proyek teknis fokus pada implementasi proyek regional bersama seperti perlindungan terhadap lingkungan, perdagangan listrik regional, membangun kepercayaans dan perkembangan sosio-ekonomi (Seide, 2014). Jalur CFA lebih fokus pada aspek legal dan politik dengan membicarakan pemanfaatan Sungai Nil yang adil dan jelas tanpa menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap negara-negara riparian (Seide, 2014).

Keberhasilan yang dicapai oleh NBI adalah berhasil mengikutsertakan seluruh negara riparian untuk bergabung serta menerima komitmen yang cukup tinggi dari negara-negara tersebut serta mendapatkan dukungan dan perhatian dari mitra perkembangan dan organisasi regional berkat proyek-proyek regional mereka (Seide, 2014).

2.1.2.2 Cooperative Framework Agreement 2010

Cooperative Framework Agreement (CFA) merupakan pakta berisikan asas, hak, dan kewajiban untuk pengelolaan dan perkembangan kooperatif untuk sumber daya air dari Sungai Nil (nilebasin.org, n.d.). CFA memiliki tujuan yaitu untuk menetapkan kerangka kerja untuk mempromosikan pengelolaan terintegrasi, perkembangan berkelanjutan, dan pemanfaatan yang harmonis serta konservasi dan perlindungan sumber daya Sungai Nil (nilebasin.org, n.d.). CFA berusaha mencapai tujuan tersebut dengan pembentukan institusi permanen yaitu Nile River Basin Commission (NRB) yang akan mempromosikan serta memfasilitasi implementasi CFA dan memfasilitasi kerjasama antara negara riparian terkait konservasi, pengelolaan, dan perkembangan Sungai Nil (nilebasin.org, n.d.). Naskah CFA telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade yaitu dari tahun 1997 hingga dibuka untuk ditandatangani pada 2010 (nilebasin.org, n.d.). Hingga pada 2019, terhitung sudah 4 negara yang menandatangani dan meratifikasi CFA yaitu Ethiopia, Rwanda, Tanzania, dan Uganda serta 2 negara yang hanya menandatangani yaitu Kenya dan Burundi (nilebasin.org, n.d.). Kronologi perkembangan CFA dapat diamati secara mendetail dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evolusi Cooperative Framework Agreement

Tanggal	Tahapan	Penjelasan
Januari 1997 - Maret 2000	Panel Ahli	Persiapan naskah, dokumen kerja berisikan asas, hak, dan kewajiban, dan institusi
Agustus 2000 - Agustus 2001	Komite Transisional	Naskah diubah menjadi draf perjanjian
Desember 2003 - Desember 2005	Komite Negosiasi	Draft Perjanjian dirundingkan dengan mandat penuh; masih banyak keberatan
Maret 2006 - Juni 2007	Perundingan Kementerian	Draft Perjanjian dikembangkan hingga sisa satu keberatan; keberatan terakhir dirujuk kepada Kepala Negara
Agustus 2008	Nile-COM	Membuka kembali dokumen di tingkat kementerian
Pertemuan Kinshasa 22 Mei 2009	Nile-COM	7 negara anggota sepakat untuk menambahkan pasal 14b untuk resolusi nanti oleh NRBC; Mesir keberatan dan Sudan tidak hadir tapi kemudian menyampaikan keberatan
Nairobi 3 Juli 2009	Pertemuan negara-negara negosiator	7 negara menyetujui naskah yang sudah dirapikan; keberatan berat oleh Mesir dan Sudan
Pertemuan Alexandria 27 - 28 Juli 2009	Nile-COM	Keputusan bersama untuk memberikan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan bersama
Entebbe September 2009	Joint Nile-TAC dan Komite Negosiator	Pertimbangan terhadap opsi untuk maju bersama
Dar es Salaam Desember 2009		

Sharm el Sheikh April 2010		
Pertemuan Sharm el Sheikh 13 April 2010	Nile-COM	7 negara setuju untuk membuka CFA untuk tanda tangan; posisi ditolak oleh Mesir dan Sudan
14 Mei 2010	CFA dibuka untuk tanda tangan	4 negara yaitu Ethiopia, Rwanda, Tanzania, dan Uganda menandatangani CFA di Entebbe, Uganda
19 Mei 2010	Penandatanganan	Kenya menandatangani CFA di Nairobi, Kenya
28 Februari 2011	Penandatanganan	Burundi menandatangani CFA di Bujumbura, Burundi
13 Juni 2013	Ratifikasi	Ethiopia meratifikasi CFA
28 Agustus 2013	Ratifikasi	Rwanda meratifikasi CFA
26 Maret 2015	Ratifikasi	Tanzania meratifikasi CFA
15 Agustus 2019	Ratifikasi	Uganda meratifikasi CFA

Sumber : Nilebasin.org, 2023

Dari tabel 2.1, dapat diamati bagaimana CFA dikembangkan. Melalui tabel 2.1, dijelaskan bahwa Mesir sendiri belum menyetujui dan meratifikasi perjanjian tersebut

2.1.3 Peran Perjanjian Terdahulu Terhadap Sengketa

Dengan adanya berbagai perjanjian yang telah terbentuk untuk mengatur pembagian Sungai Nil, muncul pertanyaan apakah perjanjian ini tidak dapat

digunakan untuk mencegah atau sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa akibat pembangunan GERD?

Kebanyakan dari perjanjian ini belum bisa membantu penyelesaian dikarenakan beberapa hal. Pertama, seluruh perjanjian bilateral yang dilakukan pada tahun 1929 dan 1959 ditandatangani oleh Inggris yang pada saat itu memiliki kekuasaan kolonial dengan Mesir dan antara Mesir dan Sudan, oleh karena bentuknya merupakan perjanjian bilateral maka perjanjian tersebut tidak diterima oleh negara riparian lainnya (Mohammed, 2021).

Sedangkan untuk CFA sendiri, perjanjian tersebut ditolak oleh Mesir dan Sudan yang sudah merasa bahwa perjanjian pada tahun 1959 sudah dapat digunakan sebagai acuan (Mohammed, 2021). Negara riparian yang berada di hulu merasa bahwa kepentingan mereka tidak diakomodir oleh perjanjian terdahulu, oleh karena itu mereka lebih mendukung CFA (Mohammed, 2021). Tetapi CFA juga tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa Sungai Nil karena Mesir dan Sudan belum menyetujui dan meratifikasi perjanjian ini.

2.2 Sejarah Kepemilikan Serta Konflik Sungai Nil

2.2.1 Peran dan Manfaat Sungai Nil bagi Mesir

Berdasarkan penemuan paling tua dalam sejarah, Sungai Nil sangat berkaitan erat dengan Mesir Kuno. Hal tersebut dikarenakan ditemukan banyak literatur yang membahas mengenai Sungai Nil yang berasal dari Mesir Kuno. Dalam Mesir Kuno, Sungai Nil bukan hanya dilihat sebagai sumber air, tetapi

sebagai sebuah “twin blessings” yang juga memberikan kesuburan tanah (Nezar Alsayyad, 2021). Hal tersebut dikarenakan air yang dibawa oleh Sungai Nil mengawali perjalanan sektor agrikultur bagi masyarakat Mesir. Tidak jauh berbeda dengan masa kini, daerah-daerah yang berdekatan dengan Sungai Nil pun dapat berkembang pesat karena produktivitasnya.

Pengaruh Sungai Nil kepada sektor agrikultur dapat dikatakan memiliki dampak yang sangat besar apabila dilihat secara gambaran besar. Masyarakat Mesir memulai produksi pertanian mereka dengan sepenuhnya bergantung pada air yang dibawa oleh Sungai Nil dan bukan hujan. Berbagai konsep yang dikenal dalam agrikultur dalam hal irigasi berhasil lahir pada era Pharaoh pada 3100 SM (Allan and Howell, 1994). Melalui gaya hidup agrikultur pula Mesir menghasilkan pemerintahan birokrasi dan negara teritorial tertua dalam sejarah (Assmann, 2003).

Namun, Sungai Nil bagi peradaban kuno Mesir bukan hanya memiliki peran tersebut, sungai ini juga memberikan pengaruh pada perkembangan ilmu dan budaya Mesir (Nezar Alsayyad, 2021). Hal tersebut dikarenakan Sungai Nil juga memiliki peran penting dalam perkembangan agama di Mesir yang kemudian membentuk identitas serta budaya masyarakat Mesir (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Peran Sungai Nil dalam perkembangan agama dapat dikatakan cukup besar karena perannya tidak hanya berhenti di satu agama saja, tetapi pada aliran kepercayaan Mesir Kuno dan dua agama besar yang pernah menguasai Mesir yaitu Islam dan Kristen. Dalam aliran kepercayaan Mesir Kuno, peran tersebut dapat dilihat dari bagaimana salah satu figur dewa mereka yaitu Dewa Hapi merupakan dewa dari Sungai Nil yang melambangkan kesuburan

(Nezar Alsayyad, 2021). Kemudian dalam agama Kristiani, Sungai Nil seringkali tertulis dalam Kitab Injil dalam peristiwa-peristiwa penting seperti bagaimana Musa bertarung dengan Firaun atau ketika Yusuf membantu Mesir dari kelaparan (Nezar Alsayyad, 2021).

Kemudian dalam perkembangan agama Islam, pada saat itu agama mulai memiliki peran yang lebih besar dalam pembentukan identitas bagi masyarakat Mesir (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Maka dari itu, pada saat agama Islam masuk ke Mesir dan kemudian berdirilah Kekaisaran Islam yang terus diperjuangkan oleh Mesir selama lebih dari 400 tahun (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Selama periode ini, agama menjadi determinan kuat dalam pembentukan identitas Mesir dan juga semakin memperkuat kaitannya kepemilikan Sungai Nil.

Ketergantungan antara Mesir Kuno dengan Sungai Nil juga dapat dilihat melalui hubungan antara kondisi sungai, seperti sedang surut atau melimpah, dengan keadaan dinasti Mesir saat itu dimana kondisi sungai yang baik akan membawa kesuksesan bagi dinasti tersebut sehingga penduduk Mesir melihat Sungai Nil sebagai dasar hidup serta sumber dari keamanan (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Melihat ketergantungan Mesir terhadap Sungai Nil maka cukup wajar apabila Mesir akan secara aktif berusaha melindungi kepemilikan mereka terhadap sungai tersebut namun apakah Sungai Nil benar-benar hanya menjadi milik Mesir pada era kuno?

Kemudian apabila kita perhatikan pada era saat ini, Mesir masih memiliki ketergantungan yang besar pada Sungai Nil. Dari seluruh populasi masyarakat Mesir, 95 persen diantaranya menghuni kawasan di pinggir Sungai Nil dan pada deltanya sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada sungai (Walsh et al., 2020).

Grafik 2.1 Pertumbuhan Penduduk Mesir tahun 2017 - 2023

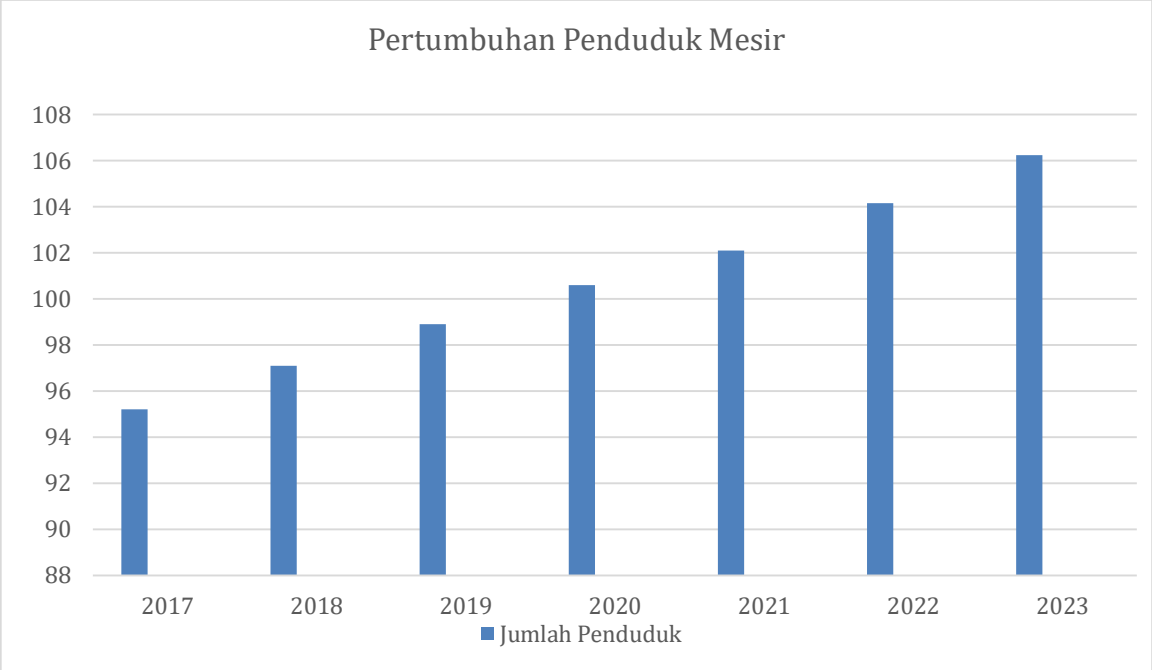

Sumber : Statista.com, 2023

Jika kita lihat pada grafik 2.1, Mesir juga terus mengalami perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tentu juga berpengaruh pada peningkatan kebutuhan Mesir terhadap sumber daya Sungai Nil.

Gambar 2.2 Peta Kepadatan Penduduk Mesir Tahun 2018

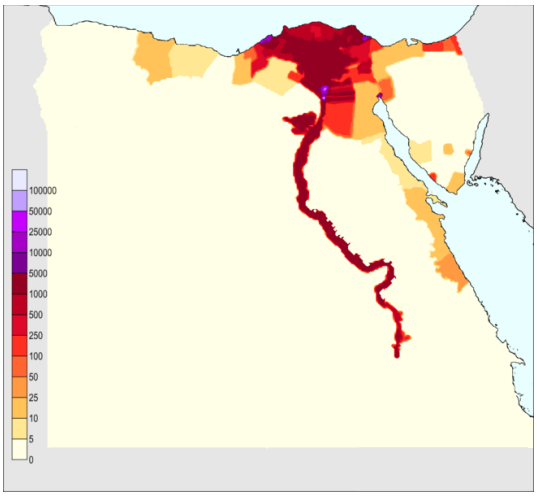

Sumber : Vividmaps.com, 2018

Kemudian apabila kita amati dari gambar 2.2, dapat dilihat bahwa daerah sekitaran Sungai Nil dan delta ditandai oleh warna merah pekat yang berarti area tersebut ditinggali oleh lebih dari 1000 orang. Warna tersebut menunjukkan bahwa area tersebut memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lain di Mesir.

Bukan hanya dari sisi penduduk yang membutuhkan sumber daya air dari sungai untuk kebutuhan keseharian mereka, Sungai Nil juga memiliki dampak yang besar kepada Mesir sebagai negara dalam bidang pertanian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanian Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil sebagai sumber irigasi. Oleh karena itu, pemanfaatan terbesar air dari Sungai Nil bagi Mesir sebenarnya adalah sebagai sumber irigasi pertanian sebagian besar dari penduduk mereka. Jika dilihat berdasarkan gambar 2.2, disepanjang aliran Sungai Nil yang telah berada di perbatasan Mesir dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber irigasi.

Gambar 2.3 Peta Irigasi di aliran Sungai Nil

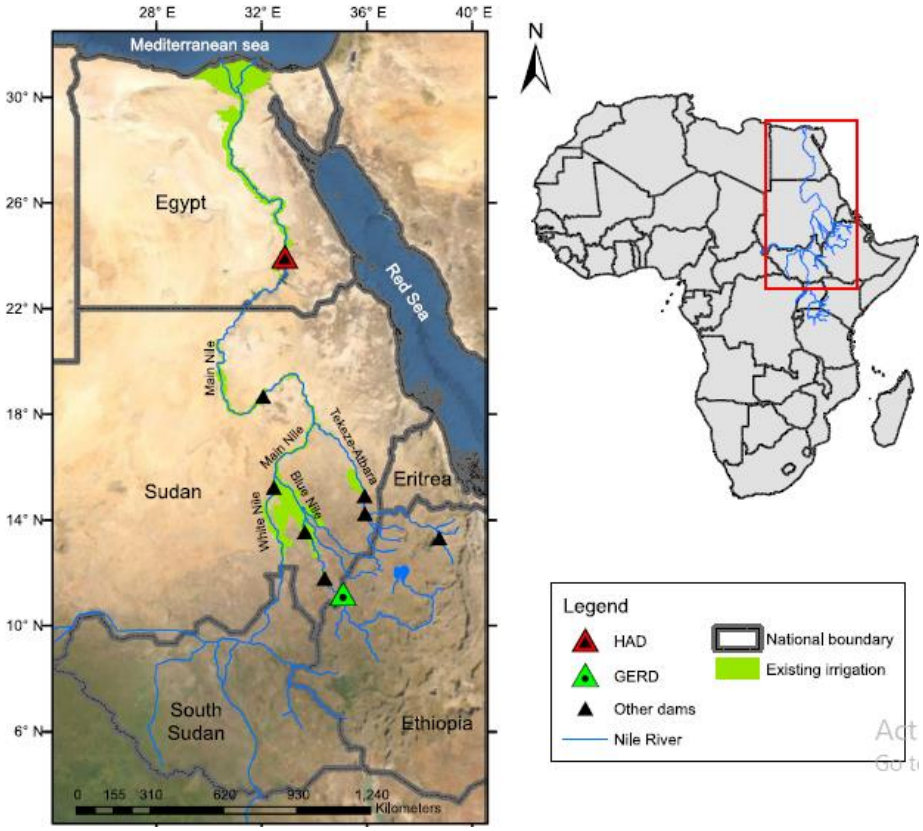

Sumber : https://www.nature.com/articles/s41467-021-25877-w#Fig1, 2020

Dari gambar 2.2 dan gambar 2.3, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Mesir kebanyakan menempati area disekitaran Sungai Nil dan deltanya. Penduduk tersebut kemudian memanfaatkan Sungai Nil sebagai sumber irigasi pertanian. Dibandingkan dengan negara pariah lainnya, Mesir termasuk negara dengan jumlah irigasi terbanyak, bersama dengan Sudan dan Eritrea.

Berdasarkan pada tabel 2.2, walaupun sektor agrikultur Mesir bukan penyumbang terbesar bagi perekonomian warga, sektor ini tetap secara stabil memberikan pemasukan di kisaran belasan persen pada perekonomian. Kontribusi agrikultur bukan hanya dapat dilihat melalui kontribusi mereka terhadap GDP tetapi juga dalam sisi lapangan pekerjaan. Di laporan ekonomi Mesir tahun 2019,

dijelaskan bahwa seperempat dari angkatan kerja Mesir berprofesi di dalam sektor agrikultur (Bank Audi, 2020).

Tabel 2.2 Agrikultur dalam GDP Mesir

Tahun	Persentase Kontribusi Agrikultur dalam GDP
2011	13,87
2012	11,27
2013	11,27
2014	11,34
2015	11,39
2016	11,77
2017	11,49
2018	11,23
2019	11,05
2020	11,57
2021	11,83

Sumber : Statista.com, 2023

Terakhir yaitu terkait dengan transportasi. Sistem transportasi di Mesir saat ini bukan termasuk yang terbaik di dunia dalam hal pelayanan. Namun transportasi Mesir masih mengutamakan Sungai Nil. Walaupun Mesir sudah memiliki kereta dan bis, masih banyak masyarakat yang memilih transportasi via Sungai Nil untuk meningkatkan efisiensi (Egypt Embassy, n.d.). Selain menjadi pilihan bagi masyarakat, mode transportasi di Sungai Nil juga ditujukan bagi kegiatan

parawisata. Perjalanan perahu di sepanjang Sungai Nil bukan hanya bagi transportasi tetapi juga menjadi kawasan pariwisata bagi para turis dengan berbagai pilihan jenis perahu (Lee, 2022). Walaupun kontribusi pariwisata pada perekonomian Mesir tidak sebesar sektor Agrikultur namun sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 sebelum akhirnya terdampak oleh pandemi COVID-19 (World Data Info, n.d.).

Kondisi lingkungan terkait Sungai Nil juga menjadi salah satu hal yang membuat Mesir semakin protektif terhadapnya. Perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia juga ikut menimpa Sungai Nil. Mesir sendiri merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim yang telah terjadi selama 30 tahun belakangan ini dengan berbagai dampak seperti peningkatan gelombang panas, badai debu, badai di teluk mediterania dan peristiwa cuaca ekstrem lainnya (UNICEF, n.d.). Perubahan iklim juga berpotensi menyebabkan penurunan hasil panen, kerawanan pangan, dan kelangkaan air, seluruh hal tersebut diakibatkan oleh hilangnya lahan pertanian dan peningkatan suhu yang dibawa oleh perubahan iklim (Al-Youm, 2019). Hal tersebut tentu memberikan dampak pada Sungai Nil. Garis pantai delta Sungai Nil mengalami penyurutan sekitar 60 kaki tiap tahunnya. Akibat dari kelangkaan air yang dihadapi Mesir, pemerintah harus mengurangi jenis pertanian yang membutuhkan banyak air seperti beras sehingga lahan pertanian padi berkurang hinggan 31 persen pada Januari 2018 (Schaefer, n.d.).

2.2.2 Keuntungan Sungai Nil bagi Ethiopia

Posisi penting Sungai Nil bukan hanya disematkan oleh Mesir saja, tetapi tentu saja oleh Ethiopia. Walaupun tidak banyak ditemukan literatur mengenai Sungai Nil dengan Ethiopia tetapi dari beberapa yang berhasil ditemukan juga menunjukkan bahwa Ethiopia melihat Sungai Nil sebagai aset yang sangat penting. Walaupun memang apabila dibandingkan dengan Mesir yang pembentukan identitasnya sangat kental dengan Sungai Nil, Ethiopia hanya melihat Sungai Nil sebagai sungai yang lebih banyak dipilih oleh masyarakatnya dibandingkan dengan sungai-sungai lainnya. Sungai Nil, khususnya Nil Biru, dilihat sebagai aset penting bagi Ethiopia karena sungai ini berperan dalam menjaga hubungan dengan Timur Tengah serta digunakan juga oleh sebagian dari masyarakatnya sebagai rute migrasi (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

Merujuk kembali pada gambar 2.2, ada beberapa sungai di Ethiopia yang mengalir pada aliran utama Sungai Nil yaitu Sungai Nil Biru dan Sungai Tekezē-Atbara. Sungai Nil Biru berasal dari Danau Tana dan berkontribusi sebesar 7 persen terhadap pasokan air Sungai Nil (Harold Edwin Hurst & El-Kammash, 2019). Sedangkan Sungai Tekezē-Atbara adalah salah satu Sungai yang membentuk Sungai Atbara yang merupakan salah satu sumber pasokan air Sungai Nil juga (Harold Edwin Hurst & El-Kammash, 2019). Sungai ini berkontribusi sebesar 10 persen pada pasokan air Sungai Nil (Harold Edwin Hurst & El-Kammash, 2019).

Bagi Ethiopia, sumber daya yang mereka dapatkan dari Sungai Nil mereka manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ethiopia sendiri memiliki potensi hydropower terbesar di Afrika setelah Republik Kongo (Hailu, 2022).

Tabel 2.3 Daftar Pembangkit Listrik Berskala Besar Ethiopia

No.	Pembangkit Listrik Berskala Besar	Tahun Penyelesaian	Kapasitas	Rata-Rata Produksi Energi (GWh)
1	GenaleDawa III	2020	254	
2	Gilgel Gibe III	2016	1.870	6.500
3	Beles	2010	460	1.867
4	Tekeze	2009	300	1.393
5	Gibe II	2009	420	1.635
6	Gibe I	2004	184	722
7	MelkaWakena	1988	153	543
8	Fincha	1972	134	760
9	FinchaaAmertiNeshe	2011	97	
10	Tis Abay II	2001	73	359
11	Koka	1960	43,2	110
		Total	3.988,20	13.889

Sumber : https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/energy.2022006?viewType=HTML, 2022

Tabel 2.4 Daftar Pembangkit Listrik Berskala Kecil Ethiopia

No.	Pembangkit Listrik Berskala Kecil	Tahun Operasional	Kapasitas (kW)
1	Aba Samuel	1932	6.600
2	Sor 2	1990	5.000
3	Dembi	1991	800
4	Yadot	1990	350
5	Tis Abbay I	1953	12.000
6	Awash 2	1965	32.000
7	Awash 3	1971	32.000
		Total	88.750

Sumber : https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/energy.2022006?viewType=HTML, 2022

Dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4, hingga saat ini Ethiopia sudah memiliki 7 buah pembangkit listrik tenaga air berskala kecil dan 11 buah pembangkit listrik tenaga air berskala besar (Hailu, 2022). Untuk memberikan gambaran mengenai banyaknya masyarakat yang dapat menggunakan listrik dari pembangkit listrik ini,

kapasitas Pembangkit Listrik Gilgel Gibe III yaitu 1870 MW dapat memberikan listrik bagi 1,2 juta rumah (Gessesse, 2021). Namun terlepas dari total energi yang dihasilkan pembangkit listrik, Ethiopia masih menghadapi defisit energi tertinggi kedua di Afrika dengan total 60 juta masyarakatnya masih tidak bisa mengakses listrik (Gessesse, 2021). Oleh karena itu pemerintah Ethiopia terus mengembangkan potensi yang dimiliki pembangkit listrik tenaga air.

Kasus ketergantungan yang terjadi di Mesir juga terjadi di Ethiopia akibat pertambahan penduduk, walaupun signifikansinya tidak sebesar pada Mesir. Ethiopia mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih besar daripada Mesir. Pertumbuhan tersebut tentu menyebabkan peningkatan produksi makanan yang sangat bergantung pada sumber daya air (Richard Kyle Paisley, 2019). Sektor agrikultur Ethiopia juga menjadi salah satu sektor dengan lapangan pekerjaan terbesar di negara tersebut dengan lebih dari 70 persen dari populasi Ethiopia bekerja di sektor tersebut (World Bank, 2022). Berdasarkan gambar 2.2, pemanfaatan sungai-sungai yang mengalir pada Sungai Nil bukan sebagai irigasi, tidak seperti Mesir yang sumber daya irigasi mereka lebih bergantung pada Sungai Nil.

2.3 Hubungan Mesir dan Ethiopia

Hubungan antara Mesir dan Ethiopia sudah berlangsung sejak zaman kuno. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui beberapa kemiripan dalam budaya mereka sehingga ada banyak teori dari peneliti mengenai penyebab hal tersebut seperti bagaimana Mesir Kuno memiliki keturunan yang berasal dari Ethiopia atau

Ethiopia yang terpengaruh akibat migrasi masyarakat Mesir ke sana (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Karena agama merupakan determinan pembentuk identitas baik Mesir maupun Ethiopia oleh karena itu agama juga menjadi determinan dalam hubungan antara Mesir dengan Ethiopia.

Seperti bagaimana Islam berperan dalam identitas Mesir, Kristen juga memiliki peran penting dalam perkembangan Ethiopia karena dua hal yaitu Kristen berhasil menyerap tradisi lokal dan menggabungkan kepercayaan-kepercayaan yang populer serta Kristen dapat menjadi penghubung Ethiopia dengan dunia luar salah satunya yaitu Mesir (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Gereja Ethiopia dengan Gereja Mesir berhubungan dalam hal keuskupan dan hubungan ini berasal dari evolusi Kristen di Ethiopia namun hubungan ini diputus pada tahun 1959 (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Perselisihan antara Mesir dan Ethiopia mulai muncul ketika Mesir menjadi negara mayoritas Islam dan membawa Islam ke Ethiopia sehingga menciptakan masyarakat minoritas Muslim di sana (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

Faktor lain pembentuk hubungan Ethiopia dan Mesir selain agama yaitu Sungai Nil itu sendiri secara langsung. Yang dimaksud di sini adalah Mesir yakin bahwa Sungai Nil bersumber dari Ethiopia (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Kepercayaan ini mengakibatkan para pemimpin Mesir juga percaya bahwa Ethiopia memiliki kapabilitas dalam mengendalikan volume air Sungai Nil yang kemudian dapat berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan Mesir walaupun hal tersebut tidak mungkin dilakukan pada masa itu (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021).

Secara sederhananya, kedua negara memiliki persepsi yang berbeda terkait hak kepemilikan atas Sungai Nil. Mesir merasa bahwa itu hak mereka berdasarkan ketergantungan mereka serta sejarah yang panjang sedangkan Ethiopia merasa mereka berhak atas Sungai Nil karena sumber dari sungai tersebut terletak di dalam teritori mereka (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021). Perbedaan persepsi tersebut ikut menjadi penguat potensi terjadinya konflik.

Pada era Mesir Kuno, sebenarnya para negara yang dilewati lainnya juga menikmati sumber daya yang dihasilkan oleh Sungai Nil namun belum ditemukan perjanjian resmi atau formal antar negara untuk mengatur perilaku masing-masing terhadap Sungai Nil. Bahkan hingga pada akhir dari abad ke 19, masih belum ada kerangka institusional yang mengatur hubungan antar negara (Tayia, Ramos Barrado and Alonso Guinea, 2021) Hubungan kerja sama yang pernah ditemukan ditemukan antara Mesir dengan Ethiopia sejak abad ke 12 berkaitan dengan Sungai Nil yaitu ketika el-Musta'ala Bellah, kalif dari dinasti Fatimid, meminta informasi dari Raja Ethiopia mengenai perkiraan jumlah air kiriman yang akan turun ke Mesir (Nezar Alsayyad, 2021). Hal tersebut juga dikarenakan perbedaan persepsi atas hak kepemilikan tersebut sehingga perjanjian formal baru dikeluarkan pada awal abad ke 20.

Sejarah panjang yang meliputi Sungai Nil serta peran pentingnya kepada tiap teritori yang dilalui membuat Sungai Nil menjadi suatu hal yang dapat menciptakan konflik. Bahkan sejak abad ke 12, telah ditemukan jejak konflik awal yang didasari perebutan Sungai Nil (Carlson, 2013). Pada saat itu, Mesir dikuasai oleh Dinasti Fatimid yaitu dinasti Islam terbesar kala itu sedangkan Raja Ethiopia

serta kebanyakan dari masyarakatnya merupakan penganut Kristiani. Oleh karena itu, ketika Raja Ethiopia memperingatkan para Sultan Islam Mesir saat itu untuk tidak mengusik Sungai Nil maka menghasilkan konflik yang akhirnya sarat dengan agama (Carlson, 2013).

Ketika suatu entitas memiliki kedudukan penting bagi berbagai pihak maka entitas tersebut pun dapat kemudian dijadikan sebagai alat dalam mengancam satu sama lain, tidak berbeda dengan Sungai Nil. Konflik bukan hanya akibat dari perebutan tetapi konflik juga dapat timbul sebagai hasil dari penggunaan Sungai Nil sebagai alat pengancam. Posisi geografis tentu saja menguntungkan Ethiopia dengan letaknya yang berada lebih tinggi dibandingkan Mesir maka Ethiopia dapat memiliki kendali yang lebih dibandingkan dengan Mesir.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh James Bruce, pertama kali ditemukan upaya untuk menggunakan Sungai Nil sebagai alat untuk menekan Mesir adalah pada saat pemerintahan Kaisar Zagwe Lalibala pada tahun 1172-1212 (Pankhurst, n.d.). Namun karena pernyataan tersebut sayangnya memiliki banyak kelemahan yang kemudian dianggap oleh para ahli sebagai pemikiran yang kurang kuat. Namun berdasarkan pada literatur dari Ethiopia sendiri, pemimpin Zagwe terakhir yaitu Na'akuto La'ab yang turun tahta pada 1270 menginginkan untuk mengalihkan aliran Sungai Takazze dan mendoakan agar aliran Sungai Nil ke Mesir dihentikan karena Mesir saat itu menolak untuk membayar upeti mereka kepada Ethiopia, dan Na'akuto tidak terindikasi melakukan tindakan apa-apa selain mendoakan hal tersebut (Pankhurst, n.d.).

Hubungan kedua negara pada era modern dimulai pada tahun 1930 yang juga merupakan awal dari hubungan diplomatik kedua negara (State Information Service, 2018). Hubungan ini mulai menghadapi ketegangan ketika Mesir dibawah kepemimpinan Muhammad Anwar Sadat memberikan dukungan kepada Sudan dalam terkait isu *Eritrean Liberation Movement* (State Information Service, 2018). Di era kepemimpinan ini juga, hubungan antara kedua negara mulai diwarnai oleh konflik air (State Information Service, 2018).

Di sisi lain, hubungan pada bidang selain politik terus berjalan. Pada April 2005, diadakan pertemuan antara kedua negara untuk membahas peningkatan hubungan bilateral pada beberapa bidang yaitu ekonomi, perdagangan, perkembangan sumber air, dan proyek joint investment (State Information Service, 2018). Juli 2006, kedua negara menandatangani perjanjian dan protokol terkait perlindungan investasi, hubungan sosial, media dan pariwisata (State Information Service, 2018).

Pada tahun 2010 ke atas, hubungan bilateral dalam hal perdagangan diantara kedua negara ini mengalami peningkatan dari sebelumnya (Ebaidalla, 2016). Walaupun mengalami perdagangan mereka terus mengalami peningkatan, hubungan bilateral masih menghadapi tantangan yang mengurangi potensi maksimal mereka yaitu perbedaan budaya dan bahasa serta tidak ada perbatasan yang secara langsung (Ebaidalla, 2016). Dari grafik 2.2, dapat diamati bahwa ekspor Mesir ke Ethiopia terus mengalami kenaikan walaupun mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 sedangkan ekspor Ethiopia ke Mesir cenderung naik turun.

Grafik 2.2 Perkembangan Ekspor Mesir - Ethiopia

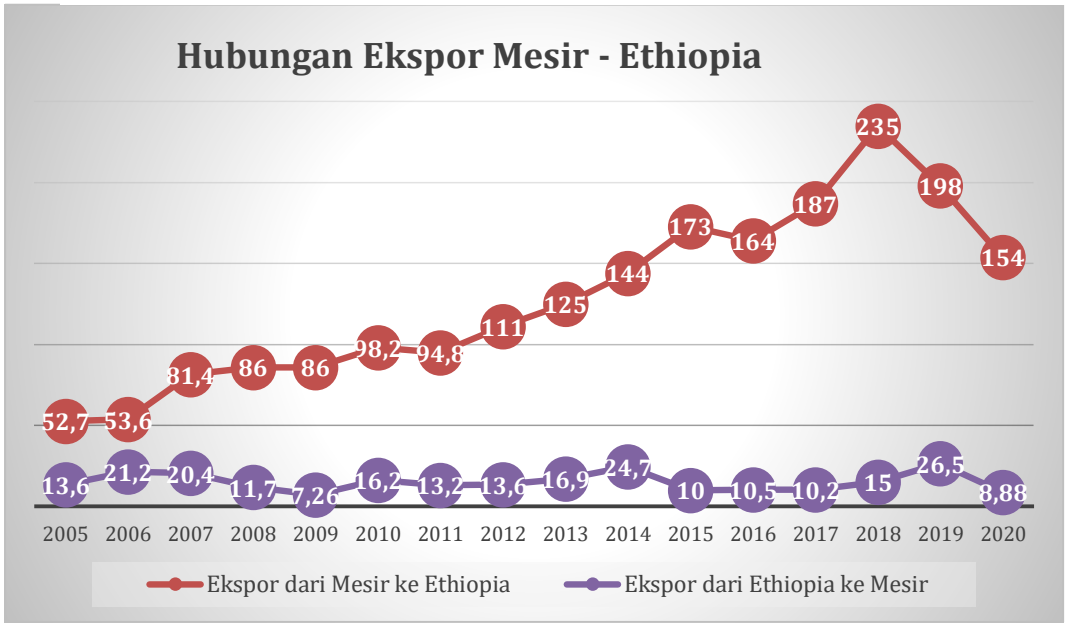

Sumber : https://oec.world/en/profile/bilateral-country/egy/partner/eth?dynamicBilateralTradeSelector, 2023.

Dilihat dari angka total ekspor dalam grafik 2.2, Mesir dan Ethiopia bukanlah *partner* dagang yang penting atau terbesar bagi satu sama lain. Pada tahun 2019, partner dagang utama Ethiopia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Jerman (Statista, 2023). Sedangkan partner dagang utama Mesir adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Italia, Jerman, dan negara – negara Teluk Arab (Raymond William Baker & Charles Gordon Smith, 2018). Perbandingan antara partner dagang utama masing-masing negara dapat dilihat dalam grafik 2.3 dan grafik 2.4.

Grafik 2.3 Persentase Ekspor Mesir tahun 2019

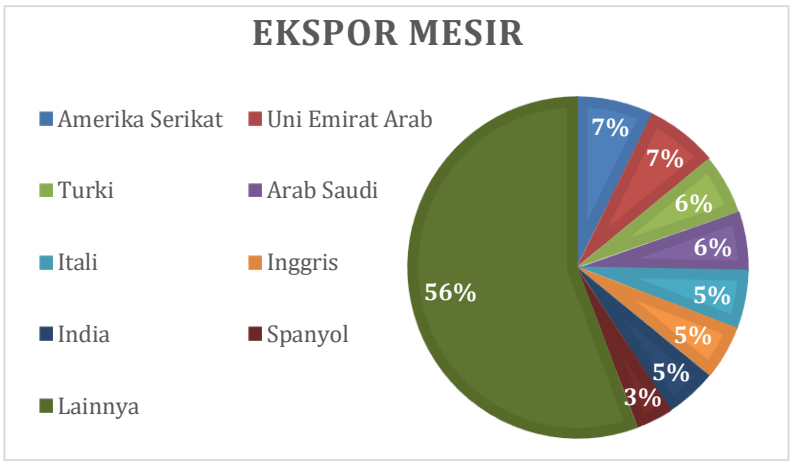

Sumber : https://www.britannica.com/place/Egypt/Trade, 2019

Grafik 2.4 Persentase Ekspor Ethiopia Tahun 2019

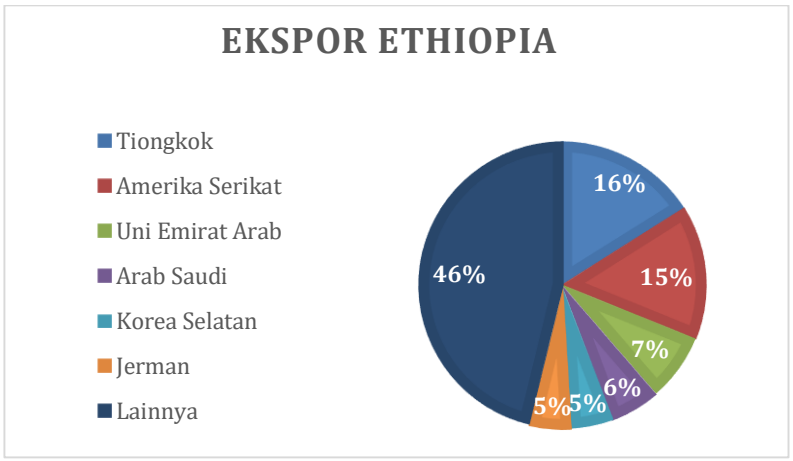

Sumber : https://www.statista.com, 2019

Dari kedua grafik ini, posisi Ethiopia bagi Mesir maupun sebaliknya bukan merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi sesamanya. Bahkan, berdasarkan grafik 2.3 dan grafik 2.4, kedua negara tersebut tidak menempati posisi lima teratas ekspor terbesar.

2.4 Kronologi sengketa Sungai Nil 2010 paska pembangunan GERD

Gambar 2.4 Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam

sumber : https://carnegieendowment.org, 2023

Sejatinya selalu ada potensi terjadinya konflik mengingat banyaknya aktor yang berusaha mengamankan kepentingan masing-masing. Dalam penelitian ini, konflik yang difokuskan adalah yang melibatkan pembangunan Great Ethiopian Dam (GERD). Pembangunan GERD dimulai oleh Ethiopia pada April 2011 yang akan menjadi bendungan terbesar di Afrika nantinya dan diperkirakan dapat menyediakan listrik untuk 65 juta masyarakat Ethiopia yang saat ini belum bisa mengakses listrik sebagaimana kebutuhannya (Booth, 2020). Sebelumnya, telah dilakukan survey terkait lokasi pada Oktober 2009 dan Juli-Agustus 2010 (Water Technology, 2011). Desain untuk bendungan baru diserahkan pada November 2010 (Water Technology, 2011). Proyek GERD dirahasiakan oleh Ethiopia hingga pada proses pembangunan pondasi bendungan (Water Technology, 2011).

Tindakan Ethiopia tentu saja mendapatkan kecaman dari Mesir yang merasa bahwa hak mereka atas sumber daya air dari Sungai Nil akan terganggu. Mesir tentu

merasa protektif terhadap sumber daya tersebut karena ketergantungan mereka terhadap air dari Sungai Nil untuk sektor pertanian dan salah satu sumber listrik (Booth, 2020). Mesir sendiri jika diamati berdasarkan sejarah, memiliki kecenderungan untuk menolak atau tidak menyetujui perjanjian-perjanjian yang dirasa lebih merugikan Mesir dibandingkan *Nile Waters Agreement* 1929 (Booth, 2020). Permasalahannya adalah perjanjian tersebut terlalu timpang, dengan memberikan Mesir hak veto, dan tidak mengikutsertakan seluruh negara riparian yang terlibat.

Ethiopia mengklaim bahwa pembangunan bendungan tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aliran air Sungai Nil namun Mesir tetap melihat bendungan ini sebagai ancaman terhadap bagian air mereka (Mbaku, 2020). Bagi Mesir, konsekuensi yang bisa dibawa oleh pembangunan bendungan ini adalah kekurangan air (Witte, 2013). Peristiwa tersebut dapat kemudian memberikan efek domino yaitu menyebabkan potensi kegagalan panen serta pemadaman listrik (Witte, 2013). Mesir khawatir bahwa GERD dapat mempengaruhi persediaan air dari Sungai Nil pada periode banjir tahunan Sungai Nil yang sangat penting bagi sektor agrikultur (Borgen Project, 2021). Gangguan pada sektor agrikultur dapat kemudian berdampak pada keamanan sumber pangan (Borgen Project, 2021).

Berdasarkan penelitian, keberadaan bendungan ini dapat secara langsung mempengaruhi bagian air Mesir melalui dua cara yaitu dari kapasitas *reservoir* dan hasil evaporasi (Abd Ellah, 2020). Pertama yaitu kapasitas *reservoir* yang setara dengan *annual flow* Sungai Nil menuju Mesir. Kedua yaitu kerugian akibat evaporasi yang dapat mengurangi aliran Sungai Nil Biru yang merupakan salah satu

sumber bagi Sungai Nil yang pada akhirnya akan mengalir ke Mesir juga (Abd Ellah, 2020). Menurut perkiraan, defisit air yang akan diterima oleh Mesir akibat pembangunan GERD dapat mencapai ∼31 BCM yr^{-1} dimana hal tersebut melebihi sepertiga total budget air Mesir (Heggy et al., 2021).

Mesir menyampaikan keberatan mereka kepada PBB dan African Union. Dan pada bulan November 2010, Ethiopia menyampaikan bahwa desain untuk bendungan mereka telah diselesaikan (Osama, 2019). Maret 2011, Ethiopia berhasil mendapatkan kontrak sebesar 4,8 M USD dengan perusahaan Italia Salini Impregilo S.p.A untuk membangun GERD (Osama, 2019). Ethiopia sendiri sudah menyerahkan skema pembangunan kepada Mesir agar mereka bisa menilai sendiri apakah pembangunan dapat berdampak negatif kepada negara mereka pada bulan Mei di tahun yang sama (Osama, 2019). Pada November 2011, komite teknis yang berisikan Kementerian Perairan dari Mesir, Sudan, dan Ethiopia mengadakan pertemuan (Osama, 2019). Di tahun yang sama, Ethiopia sebenarnya sudah memulai pembangunan GERD dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya konsultasi dengan Mesir (Al-Anani, 2022).

Pada Maret 2013, Sudan sempat menyatakan dukungan mereka terhadap proyek GERD (Osama, 2019). Mesir kemudian mengadakan pertemuan dengan Sudan untuk membangun aliansi karena saat itu kedua negara tidak setuju terhadap ide dari CFA atau Perjanjian Entebbe (Osama, 2019). Ethiopia memulai mengalihkan aliran Sungai Nil untuk membangun GERD pada bulan Mei. Kemudian ada Juni 2013, Presiden Mesir saat itu, Mohammed Morsi menyatakan bahwa Mesir tidak menyatakan perang tapi Mesir akan melawan seluruh bentuk

ancaman terhadap keamanan air mereka, pernyataan ini disampaikan di depan seluruh pendukungnya (aljazeera, 2012). Akhirnya pada November di tahun yang sama, negosiasi dimulai antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan (Osama, 2019).

Negosiasi terus berjalan dan pembangunan GERD pun juga terus berjalan. Dari sisi perundingan, belum ditemukan hasil yang signifikan. Namun sengketa mulai mengalami peningkatan ketika Ethiopia pertama kali mengumumkan bahwa mereka sudah mulai menyelesaikan pengisian GERD pada pertengahan 2020 dan berhasil menyelesaikan pengisian ketiga untuk reservoir dan turbin kedua hydropower GERD juga sudah mulai beroperasi pada akhir 2022 (Al-Anani, 2022). Nyatanya, perundingan yang terjadi semenjak pertama kali keluar kabar pembangunan GERD tidak memberikan hasil signifikan karena pembangunan GERD yang sekarang sudah rampung dan ketegangan juga ikut meningkat.

Pada Juli 2021, Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, memberikan pernyataan bahwa Mesir saat ini menghadapi ancaman eksistensial dengan adanya GERD yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat Mesir (Al-Monitor, 2021). Pernyataan ini dikeluarkan oleh Shoukry pada pertemuannya dengan Dewan Keamanan PBB dalam upayanya untuk menemukan solusi dalam bentuk mediasi oleh pihak luar (Al-Monitor, 2021). Shoukry meminta keterlibatan PBB karena mediasi yang sejauh ini telah dilakukan oleh African Union tidak membuahkan hasil (Al-Monitor, 2021). Shoukry menyatakan bahwa Mesir akan berpotensi kekurangan air diakibatkan bendungan (Al-Monitor, 2021). Menteri Sumber Air dan Irigasi Mesir, Mohamed Abdel Aty, juga memberikan pernyataan pada Konferensi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan

Keamanan Nuklir Federal Jerman bahwa dampak bendungan pada persediaan air Mesir dapat menyebabkan gelombang imigran ilegal ke Eropa (Ayyad, 2021).